

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Ide *Corporate Social Responsibility* muncul pada tahun 1970-an di Amerika. Menurut Federick (dalam Yusuf, 2010:197) saat itu perusahaan-perusahaan di Amerika mendapat kritikan tajam karena telah menjadi sangat berkuasa dan anti sosial. Kemudian munculah tokoh bernama Andrea Caneiga, yang dikenal dermawan karena telah menyumbangkan harta kekayaannya untuk pendidikan dan lembaga sosial. Selain Caneiga, ada pula Henry Ford yang turut mengembangkan program rekreasi dan kesehatan untuk para pekerjanya di perusahaan mobil Ford. Dari situlah ide ini kemudian dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Konsep CSR kemudian makin populer pada tahun 1998 setelah Elkington menerbitkan buku yang mengemas CSR dalam tiga aspek atau dikenal sebagai *Triple Bottom Line*. Tiga aspek pada *Triple Bottom Line* ini yaitu *Profit, People, Planet* (3P). (Rachman et al., 2011:82).

1. *Profit*, mempunyai makna sebagai usaha/bisnis yang berkelanjutan secara ekonomi dalam rangka memperoleh keuntungan melalui usaha.
2. *People*, diartikan sebagai kejelasan dan keuntungan yang didapat dari para pekerja dan komunitas di sekitar perusahaan. Dengan konsep 3P ini perusahaan akan berusaha untuk tidak membahayakan tenaga kerja dan komunitas sekitar, dan mencoba memberikan manfaat kepada mereka. Pemerintah juga turut andil dalam aspek ini yaitu dengan memberlakukan bahwa perusahaan wajib merekrut setidaknya 60% tenaga kerja di daerah sekitar.
3. *Planet*, menjelaskan bagaimana perusahaan memperhatikan penggunaan sumber daya alam mereka dan bagaimana perusahaan memberikan manfaat kepada alam sekitar. Dan apabila mungkin, perusahaan harus turut membangun alam tersebut. (Hadad & Maftuchah, 2015; Sukmadi, 2016)

Elkington (1998:2) menjelaskan bahwa arti konsep 3P ini yaitu perusahaan tidak boleh hanya berfokus pada perolehan *profit*, namun juga harus memerhatikan lingkungan serta keadilan sosial. Menurutnya, implementasi 3P ini sangat penting guna menghindari terjadinya kelangkaan, atau dalam pengertian lain, dengan 3P ini perusahaan akan mengalami keberlanjutan.

Kelangkaan terjadi akibat penggunaan sumber daya yang tidak bijak oleh pelaku usaha, baik usaha skala besar atau kecil. Dalam perusahaan perkebunan misalnya, yang banyak memanfaatkan hasil alam seperti kayu, karet dan sawit sebagai sumber penghasilan mereka. Perusahaan pada sektor ini pula rupanya telah menjadi penyumbang kerusakan alam terbesar di Indonesia, bahkan berkali-kali sektor ini dikecam dunia perkara kebakaran hutan yang sering terjadi untuk pembukaan lahan sawit.

Sebagai salah satu produsen sawit terbesar di dunia, tentu di satu sisi boleh merasa bangga karena bisa mendominasi pasar minyak sawit dunia. Namun di sisi lain kekhawatiran seperti polusi dan berkurangnya hutan yang diakibatkan juga harus menjadi perhatian. Berdasarkan laporan Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2019, Dari total emisi yang dihasilkan Indonesia, 85%-nya berasal dari penghancuran hutan dan konversi lahan gambut. Lenyapnya hutan dan lahan gambut ini diakibatkan pembalakan, pengeringan ataupun pembakaran untuk membuka lahan kelapa sawit. Padahal ketika lahan gambut tersebut dikeringkan dan dibakar, maka akan menjadi bom karbon dan melepaskan hampir dua miliar ton karbondioksida berbahaya setiap tahun. Pembalakan, penebangan, pembakaran hutan juga akan meningkatkan Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer.

Belum lagi masalah limbah. Berdasarkan data Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2018 (Badan Pusat Statistik, 2018) pada tahun 2016 setiap ton tandan buah segar (TBS) yang diolah dari perusahaan sawit mampu menghasilkan 140-200kg CPO. Sementara limbah yang dihasilkan antara lain limbah cair/*Palm Oil Mill Effluent* (POME) sebesar 600-700kg, tandan kosong kelapa sawit (TKKS) sebesar 230kg, dan cangkang sebesar 190kg. Jumlah limbah yang dihasilkan ini lebih besar daripada jumlah CPO yang diproduksi.

Data dari Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2018 juga menyebutkan jika pada tahun 2017 agro industri menjadi sektor yang paling sedikit mengelola limbah yaitu sebesar 1%. Jumlah ini bahkan lebih sedikit dari sektor manufaktur yang mengelola limbah sebanyak 2%.

Dampak negatif yang begitu besarnya ternyata tidak sebanding dengan tanggung jawab sosial yang mereka lakukan seperti yang disajikan dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1 Persentase Pengungkapan CSR Perusahaan Perkebunan Indonesia Tahun 2019

NO	KODE PERUSAHAAN	TOPIK		
		EKONOMI	LINGKUNGAN	SOSIAL
1	AALI	46%	10%	9%
2	ANJT	46%	27%	21%
3	BWPT	46%	7%	18%
4	DSNG	54%	13%	18%
5	LSIP	31%	7%	6%
6	PALM	46%	3%	12%
7	SGRO	54%	30%	15%
8	SIMP	38%	7%	12%
9	SMAR	46%	43%	35%
10	SSMS	46%	17%	6%
11	TBLA	38%	13%	21%
RATA-RATA		45%	16%	16%
TERTINGGI		54%	43%	35%
TERENDAH		31%	3%	6%

Sumber: Laporan Tahunan Perusahaan Perkebunan 2019. Data diolah.

Tabel 1.2 Persentase CSR dari Laba Pada Perusahaan Sektor Pertanian

SUB SEKTOR	CSR 2019 (Rp)	LABA 2018 (Rp)	CSR DARI LABA (%)
TANAMAN PANGAN	-	-	-
PERKEBUNAN	160.124.930	(477.285.896)	-33,55
PETERNAKAN	-	-	-
PERIKANAN	169.981	(15.074.000)	-1,13
KEHUTANAN	-	-	-
LAINNYA	-	-	-

Sumber: Laporan Tahunan Perusahaan Pertanian 2018-2019. Data diolah

Dari tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa ternyata tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan sosial sangatlah kecil yaitu rata-rata 16% dan menjadi yang terkecil dari ketiga topik pengungkapan. Hal ini tentunya tidak sebanding dengan dampak negatif yang dihasilkan. Bahkan nilai terendah pengungkapan menyentuh angka 3% tepatnya pada topik lingkungan. Kemudian apabila melihat tabel 1.2 sub sektor perkebunan menjadi sektor dengan porsi CSR dari laba (rugi) terendah yaitu -33,55 dibanding dengan sub sektor perikanan. Meski sama-sama mengalami kerugian, namun ternyata sub sektor perikanan masih dapat dengan baik dalam hal merealisasikan dana untuk CSR. Apabila melihat kedua tabel di atas dapat disimpulkan jika sub sektor ini masih belum memberi perhatian lebih pada CSR. Padahal, pelaksanaan CSR di Indonesia sekarang ini sifatnya wajib dengan dibentuknya Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang mengatakan bahwa dalam laporan tahunan, perusahaan harus memuat laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial. Adapun Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menerbitkan PJOK Nomor 51/PJOK.03/2017 terkait kewajiban perusahaan untuk melakukan pelaporan tanggung jawab sosial. Terkait pedoman pelaporannya, sampai saat ini belum ada standar khusus yang diatur oleh pemerintah. Maka dari itu perusahaan dibebaskan untuk menentukan sendiri pedoman pelaporan berkelanjutan ini. Namun saat ini, pedoman pelaporan yang diterbitkan GRI-lah yang paling banyak digunakan. Versi terbaru pelaporan dari GRI saat ini adalah *GRI Standards* yang pelaporannya dibagi dalam tiga topik yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial.

Perlunya perusahaan melakukan pengungkapan CSR ini agar publik bisa menilai apakah perusahaan tersebut sudah melakukan tanggungjawab atas dampak dari operasi yang mereka lakukan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa operasi perusahaan banyak sekali memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Salah satunya di Indonesia adalah perusahaan perkebunan yang memproduksi minyak kelapa sawit.

Jadi, apabila perusahaan lalai akan kewajiban CSR mereka, maka akan mendapat sanksi atau hukuman. Dan bukan hal yang mustahil apabila masyarakat juga akan menuntut, mengingat mereka merupakan pihak yang paling merasakan dampak negatif dari operasi perusahaan. Hal ini akan berdampak pada operasional perusahaan, seperti terhambatnya proses produksi dan kerugian. Dan apabila pemerintah sampai mencabut izin operasional mereka, akan ada banyak pihak-pihak yang dirugikan pula.

Sumber daya yang dikelola dengan bijaksana akan memperpanjang umur bisnis karena perusahaan tidak akan mengalami kelangkaan. Selain itu dengan menjaga kelestarian alam, perusahaan juga sedang menjaga tempat tinggalnya sendiri. CSR dibentuk agar para pebisnis tidak egois dengan memikirkan diri sendiri dan keuntungan masa kini, tapi mereka juga harus memperhatikan keberlangsungan bersama. Bagaimana pun juga, dengan terus lestarinya alam ini, bisnis mereka juga akan ikut lestari.

B. Identifikasi Masalah

Pengungkapan CSR pada perusahaan dilandasi oleh beberapa teori antara lain teori legitimasi dan teori agensi. Teori legitimasi menjelaskan bahwa nilai-nilai dalam perusahaan harus selaras dengan nilai-nilai dalam masyarakat, yang perwujudannya dilakukan melalui CSR (Dowling & Pfeffer, 1975:122). Sedangkan, teori agensi menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan dalam perusahaan antara pihak prinsipal (pemegang saham, kreditur) dan pihak agen (manajer). Perbedaan kepentingan ini menimbulkan konflik sehingga untuk mengatasi konflik tersebut maka pihak prinsipal membuat dewan komisaris untuk mengawasi kegiatan agen. Konflik keagenan juga tidak selalu terjadi antar pemegang saham dengan manajer, namun kadang kala pihak pemegang saham dengan kreditur pun bisa mengalami konflik berupa penggunaan dana utang (Indrawati, 2019; Rahmawati, 2017). Kebijakan ini berhubungan dengan CSR karena dewan komisaris akan turut mengawasi apakah agen melakukan CSR dengan semestinya. Sedangkan kontrak utang akan membuat pihak agen tidak sembarangan melakukan pengeluaran termasuk untuk CSR.

Dari teori-teori tersebut dapat diturunkan lagi secara rinci mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR yang diungkap oleh para ahli dan peneliti. Untung (2014:6) mengungkapkan jika pengungkapan CSR dipengaruhi oleh peraturan pemerintah, mengingat di Indonesia pengungkapan CSR ini sudah masuk dalam kategori wajib dengan diberlakukannya UU Perseoran Terbatas Nomor 40 tahun 2007. Akan tetapi walau pengungkapan CSR ini sudah diwajibkan, pada kenyataannya, peraturan mengenai seberapa luas pengungkapan yang harus dilakukan oleh perusahaan masih belum jelas. Alhasil, setiap perusahaan akan memiliki rentang pengungkapan yang berbeda-beda. Jadi bisa dikatakan bahwa pelaksanaan CSR di Indonesia masih bersifat sukarela.

Faktor lain yang mempengaruhi pengungkapan CSR menurut Winwin Yadiati et al., (2017:129) adalah karakteristik perusahaan seperti ukuran perusahaan, status perusahaan audit, likuiditas, rasio kecukupan, profitabilitas, status pencatatan pada pasar modal asing, status perusahaan audit, ukuran dewan komisaris, rasio jumlah komite audit terhadap total dewan, *leverage*, likuiditas dan umur perusahaan. Adapun pendapat dari Spence & Painter-Morland, (2010:188) mengenai karakteristik lain yang juga mempengaruhi CSR yaitu finansial perusahaan (besarnya dana yang dimiliki perusahaan), sertifikasi perusahaan dan jumlah tahun operasi. Dari karakteristik-karakteristik tersebut, ada beberapa yang dipakai oleh peneliti sebelumnya dan yang paling banyak digunakan yaitu profitabilitas, *leverage* ukuran perusahaan, dan ukuran dewan komisaris. Hubungan pengungkapan CSR dengan keempat karakteristik tersebut dapat dijelaskan dengan teori legitimasi dan teori agensi sebagai berikut.

Pertama, hubungan profitabilitas dan ukuran terhadap pengungkapan CSR masing-masing dapat dijelaskan dengan teori legitimasi. Pengungkapan CSR akan naik ketika profitabilitas perusahaan tinggi. Hal itu dikarenakan pihak manajemen yang mampu menghasilkan profitabilitas tinggi juga memiliki pengetahuan mengenai pengungkapan CSR untuk mempertahankan legitimasi publik, karena di saat profitabilitas tinggi perhatian publik akan banyak tertuju pada perusahaan. Selain itu, perusahaan dengan profitabilitas tinggi juga dianggap memiliki sumber daya yang lebih banyak untuk melakukan pengungkapan CSR (Tagesson, et al.,

2009:355). Perusahaan dengan ukuran besar juga akan melakukan pengungkapan CSR yang lebih banyak untuk menjaga legitimasi publik terhadap mereka, karena mereka juga akan mendapat perhatian publik yang lebih banyak di banding perusahaan kecil (Rankin et al., 2011:1040).

Kedua, hubungan *leverage* dan dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR masing-masing dapat dijelaskan dengan teori keagenan, yaitu apabila *leverage* perusahaan tinggi, perusahaan akan mengurangi pengungkapan CSR mereka agar tidak menjadi sorotan kreditur apabila menggunakan dana yang berlebih untuk CSR, yang akan mengurangi kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban mereka (Watts & Zimmerman, 1986:15). Sedangkan Dewan komisaris sebagai wakil pemegang saham untuk mengawasi kinerja agen, ketika jumlahnya banyak maka pengungkapan CSR di perusahaan tersebut akan tinggi karena pengawasan yang dilakukan akan semakin banyak. Namun jumlah yang terlalu banyak justru akan membuat pengungkapan CSR rendah, hal ini dikarenakan jumlah anggota dewan komisaris yang terlalu banyak akan membuat kinerja mereka tidak efisien (Collier & Gregory, 1999:315).

Adapun hasil penelitian terdahulu mengenai CSR yang menggunakan keempat karakteristik tersebut sebagai variabel penelitian. Hasil penelitian tersebut sangat beragam atau terjadi *gap*. Variabel Profitabilitas pada penelitian Indraswari & Astika (2015); Dewi & Suaryana (2015); dan Aini (2015) menunjukkan berpengaruh pada pengakuan CSR. Penelitian Giannarakis (2014); Felicia dan Rasmini (2015); Pradnyani & Sisdyani (2015) memiliki hasil berpengaruh positif terhadap pengakuan CSR. Penelitian Krisna & Suhardianto (2016); Putri & Christiawan (2014); Dermawan & Deitiana (2014); Dyduch & Kradomska (2017); Indraswari & Mimba (2017) menunjukkan tidak memiliki pengaruh terhadap pengakuan CSR. Penelitian Arjanggie & Zulaikha (2015) menunjukkan profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Pada penelitian ini, penulis memutuskan untuk mengikuti Penelitian Giannarakis (2014) dan mengikuti teori legitimasi bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

Variabel *Leverage* pada penelitian Aini (2015) menunjukkan berpengaruh terhadap pengakuan CSR. Penelitian Putri & Christiawan (2014); Dermawan & Deitina (2014); Dyduch & Kradomska (2017); Krisna & Suhardianto (2016); Pradnyani & Sisdyani (2015) menunjukkan tidak ada pengaruh terhadap pengakuan CSR. Penelitian Chakroun, et al. (2017); Giannarakis (2014) menunjukkan hasil berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan penelitian Felicia & Rasmini (2015) menunjukkan hasil berpengaruh positif terhadap pengakuan CSR. Dari pemaparan tersebut, penulis memutuskan untuk mengikuti penelitian Chakroun, et al. (2017) dan mendukung teori agensi bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR.

Variabel Ukuran Perusahaan pada penelitian Indraswari & Astika (2015); Dyduch & Kradomska (2017) menunjukkan hasil memiliki pengaruh terhadap pengakuan CSR. Sedangkan penelitian Krisna & Suhardianto (2016); Dermawan & Deitina (2014); Felicia & Rasmini (2015) Giannarakis (2014) berpengaruh positif. Kemudian penelitian dari Bauman-Pauly, et al (2013); Chakroun, et al (2017); Pradnyani & Sisdyani (2015) menunjukkan tidak memiliki pengaruh terhadap pengakuan CSR. Dari pemaparan tersebut penulis memutuskan untuk mengikuti penelitian Giannarkis (2014) dan mendukung teori legitimasi bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

Variabel Ukuran Dewan Komisaris pada penelitian Dermawan & Deitina (2014); Dyduch & Kradomska (2017); Krisna & Suhardianto (2016) menunjukkan hasil tidak memiliki pengaruh terhadap pengakuan CSR. Penelitian Lone, et al. (2016); Pradnyani & Sisdyani (2015) menunjukkan memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Dari pemaparan tersebut penulis memutuskan untuk mengikuti penelitian dari Lone, et al. (2016) dan mendukung teori *stakeholder* bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

Dari penjelasan tersebut maka variabel Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Ukuran Dewan Komisaris dipilih sebagai variabel dalam penelitian ini. Sehingga judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Perusahaan Perkebunan di Indonesia Tahun 2015-2019”**.

C. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah di atas, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan perkebunan di Indonesia tahun 2015-2019.
2. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan perkebunan di Indonesia tahun 2015-2019.
3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan perkebunan di Indonesia tahun 2015-2019.
4. Bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan perkebunan di Indonesia tahun 2015-2019.
5. Bagaimana gambaran profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan ukuran dewan komisaris perusahaan perkebunan di Indonesia tahun 2015-2019.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur di Indonesia tahun 2018. Adapun tujuan penelitian ini, antara lain:

1. Memahami bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan perkebunan di Indonesia tahun 2015-2019.
2. Memahami bagaimana pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan perkebunan di Indonesia tahun 2015-2019.
3. Memahami bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan perkebunan di Indonesia tahun 2015-2019.
4. Memahami bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan perkebunan di Indonesia tahun 2015-2019.
5. Memahami bagaimana gambaran profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan ukuran dewan komisaris perusahaan perkebunan di Indonesia tahun 2015-2019.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
Diharapkan penelitian ini bisa menjadi sumber belajar bagi pembaca serta rujukan untuk penelitian tentang CSR di kemudian hari.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur untuk manajemen dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan CSR.
 - b. Penelitian ini dapat berkontribusi sebagai informasi kepada masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan CSR perusahaan.
 - c. Penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur pengembangan standar pelaporan CSR.